



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WIRYAWAN BUDI SASONGKO**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
3. NHK : **454308**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/70 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/70 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 112.100.000

1. MOTOR, YAMAHA LEXI SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
2. MOTOR, KAWASAKI ATHLETE SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, YAMAHA AEROX 125 SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.100.000
4. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.600.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 4.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 819.700.000**III. HUTANG** Rp. 329.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 490.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.